

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH



DAFTAR ISI

BAB I	KEBIJAKAN UMUM	1
	A. Pendahuluan	1
	B. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan	2
	C. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan	4
	D. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	4
	E. Asumsi Dasar	5
	F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	6
	G. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal	8
	H. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	9
	I. Komponen Laporan Keuangan	12
	J. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	17
	K. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	19
BAB II	KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA	20
	A. Definisi	20
	B. Klasifikasi	20
	C. Pengakuan	20
	D. Pengukuran	20
	E. Pengungkapan	21
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO	22
	A. Definisi	22
	B. Klasifikasi	22
	C. Pengakuan	22
	D. Pengukuran	24
	E. Pengungkapan	25
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA	26
	A. Definisi	26
	B. Klasifikasi	26
	C. Pengakuan	26
	D. Pengukuran	26
	E. Pengungkapan	26
BAB V	KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN	27
	A. Definisi	27
	B. Klasifikasi	27
	C. Pengakuan	27



	D. Pengukuran	29
	E. Pengungkapan	29
BAB VI	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN	30
	A. Definisi	30
	B. Klasifikasi	30
	C. Pengakuan	30
	D. Pengukuran	30
	E. Pengungkapan	31
BAB VII	KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS	32
	A. Definisi	32
	B. Klasifikasi	32
	C. Pengakuan	33
	D. Pengukuran	34
	E. Pengungkapan	34
BAB VIII	KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG	35
	A. Definisi	35
	B. Klasifikasi	35
	C. Pengakuan	36
	D. Pengukuran	38
	E. Penyisihan Piutang	38
	F. Penghapusan Piutang	41
	G. Pengungkapan	42
BAB IX	KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	43
	A. Definisi	43
	B. Klasifikasi	43
	C. Pengakuan	44
	D. Pengukuran	44
	E. Pengungkapan	45
BAB X	KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI	46
	A. Definisi	46
	B. Klasifikasi	46
	C. Pengakuan	47
	D. Pengukuran	48
	E. Penilaian	49
	F. Pelepasan dan Pemindahan Investasi	51
	G. Pengungkapan	51



BAB XI	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP	52
	A. Definisi	52
	B. Klasifikasi	53
	C. Pengakuan	55
	D. Pengukuran	55
	E. Perolehan Aset Tetap dari Donasi	57
	F. Perolehan Aset Tetap dari Pertukaran	57
	G. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap	57
	H. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (<i>Retirement and Disposal</i>)	71
	I. Penyusutan Aset Tetap	71
	J. Penilaian Kembali Aset Tetap	75
	K. Aset Bersejarah	76
	L. Pengungkapan	77
BAB XII	KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN	78
	A. Definisi	78
	B. Klasifikasi	78
	C. Pengakuan	78
	D. Pengukuran	78
	E. Pengungkapan	79
BAB XIII	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA	80
	A. Definisi	80
	B. Klasifikasi	80
	C. Pengakuan	83
	D. Pengukuran	84
	E. Amortisasi	85
	F. Pengungkapan	86
BAB XIV	KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN	87
	A. Definisi	87
	B. Klasifikasi	87
	C. Pengakuan	89
	D. Pengukuran	91
	E. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo	93
	F. Restrukturisasi Utang	94
	G. Penghapusan Utang	94
	H. Biaya-biaya Berhubungan dengan Utang Pemerintah Daerah	95



I. Pengungkapan	95
BAB XV AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN	
LAYANAN UMUM DAERAH	97
A. Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi	97
B. Definisi	97
C. Komponen Laporan Keuangan BLUD	98
D. Penggabungan Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	105
E. Penghentian Satuan Kerja BLUD Menjadi Satuan Kerja Biasa	106
BAB XVI KOREKSI KESALAHAN	107
A. Definisi	107
B. Klasifikasi	107
C. Perlakuan Koreksi	108
D. Pengungkapan	110
BAB XVII PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN	112
A. Definisi	112
B. Pengakuan dan Pengukuran	112
C. Pengungkapan	115
BAB XVIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI	117
A. Definisi	117
B. Pengakuan	119
C. Pengukuran	119
D. Perlakuan	121
E. Pengungkapan	122

